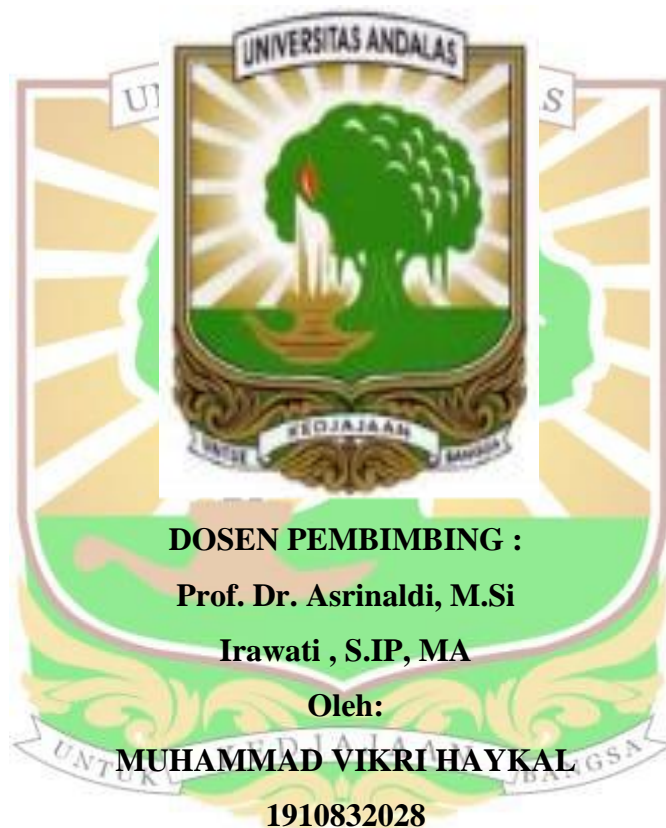


**TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN
BARAT DALAM PERUBAHAN STATUS NAGARI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menyelesaikan Gelar Sarjana Ilmu Politik



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

Pergeseran paradigma otonomi daerah dari pembangunan daerah menjadi membangun daerah merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Indeks Desa Membangun difokuskan untuk penguatan otonomi desa, ini melanjutkan cita-cita semangat nasional dalam rangka penguatan kualitas kehidupan desa serta membangun Indonesia dari desa. Indeks Desa Membangun meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk mengelola sebuah Desa atau Nagari tentunya harus memiliki tata kelola yang baik (*good governance*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk tata kelola pemerintahan Nagari Koto Baru dalam perubahan status dari Nagari maju menjadi Nagari mandiri. Teori yang digunakan untuk melihat bentuk tata kelola Nagari Koto Baru dalam penelitian ini adalah teori *good governance* yang dikelompokkan oleh Sedarmayanti menjadi empat prinsip yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status Nagari Koto Baru sudah memenuhi syarat dari penilaian indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Tidak hanya itu, bentuk tata kelola Nagari juga mempengaruhi dalam penilaian status Nagari. Secara keseluruhan penerapan empat prinsip *good governance* sudah berjalan dengan baik. Bentuk pertanggungjawaban sudah dilakukan, masyarakat juga dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta sudah menjalankan regulasi yang berlaku. Namun terdapat kendala di penggunaan *website* dan media sosial Nagari yang belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Indeks Desa membangun, tata kelola, Nagari



ABSTRACT

The shift in the paradigm of regional autonomy from regional development to building the region is one of the manifestations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages that is developing Indonesian from the outskirts by strengthening region and villages. The Village Development Index is focused on strengthening village autonomy, continuing the national spirit's aspirations to strengthen the quality of village life and build Indonesia from its villages. The Village Development Index places initiatives and the strong capacity of communities as the main basis in the progress and empowerment process of the village, encompassing aspects of social, economic, and ecological resilience. Thus, this index is focused on efforts to strengthen village autonomy through community empowerment. Managing a village or "Nagari" certainly requires good governance. This research aims to explain the form of governance in Nagari Koto Baru regarding the change in status from an advanced Nagari to an independent Nagari. The theory used to examine the governance of Nagari Koto Baru in this research is the theory of good governance grouped by Sedarmayanti into four principles: accountability, transparency, participation, and the rule of law. This research uses a qualitative method with a descriptive case study approach. The results show that the change in the status of Nagari Koto Baru has met the criteria in assessing social, economic, and ecological resilience indices. Not only that, the form of governance in Nagari also influences the assessment of the Nagari status. Overall, the application of the four principles of good governance has been running well. Accountability has been executed, the community has been involved in the governance process, and the regulations in place have been implemented. However, there are challenges in the optimal use of the Nagari website and social media.

Keyword: *Village Development Index, governance system, village*

